



---

<b>Judul</b>	: Cara komunikasi politik mulai bergeser
<b>Tanggal</b>	: Selasa, 19 Mei 2020
<b>Surat Kabar</b>	: Kompas
<b>Halaman</b>	: 4

PANDEMI COVID-19

Kompas, Selasa 19 Mei 2020 h. 4

## Cara Komunikasi Politik Mulai Bergeser

**JAKARTA, KOMPAS** — Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk model komunikasi politik yang dilakukan, baik di dalam lembaga politik maupun oleh para politisi. Dalam melaksanakan fungsinya, komunikasi tak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui perantaraan teknologi dengan memanfaatkan beragam aplikasi pertemuan daring.

Kebiasaan baru atau *new normal* dalam komunikasi politik ini, antara lain terlihat dalam berbagai rapat formal DPR dengan mitra kerja. Sebagian hanya hadir secara fisik, peserta rapat lainnya hadir secara daring. Selain di parlemen, rapat kabinet terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan pun dilakukan secara daring.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburohman, Senin (18/5/2020), mengatakan, pandemi Covid-19 membuat DPR melakukan rapat virtual. Meskipun kualitas komunikasi yang terjadi tidak sama dengan rapat fisik, model rapat ini telah membantu DPR menjalankan tugas peng-

awasan, penganggaran, dan legislasi. Mekanisme pengambilan keputusan pun juga berjalan. Hal ini dimungkinkan karena DPR sebelumnya telah mengubah peraturan tata tertib DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lea mengatakan, sekalipun pola komunikasi politik berubah, pertemuan fisik tetap penting. Itulah mengapa DPP Partai Golkar tetap menerima tamu meski dalam jumlah terbatas dan menerapkan protokol keamanan secara ketat.

Namun, pertemuan fisik ini tidak dapat dilakukan pada masa reses DPR kali ini. Melkiades yang berasal dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mengandalkan timnya di lapangan untuk menyerap aspirasi konstituen. Ia tidak bisa leluasa pergi ke NTT karena terkendala pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di DKI Jakarta.

Pengajar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, era komunikasi politik dengan memanfaatkan

teknologi informasi atau perangkat digital pada dasarnya memang merupakan gelombang baru cara berkomunikasi antarmanusia dewasa ini. Teknologi digital yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan perjumpaan fisik menjadi nuansa baru dalam komunikasi politik dan tak dapat diabaikan keberadaan serta perannya saat ini.

"Kanal ini mesti diperkuat. Para aktor politik, baik di suprastruktur, yakni di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, maupun di infrastruktur, baik di partai politik, figur, media, kelompok penekan, maupun kelompok kepentingan, mesti mengadaptasi perubahan berbasis teknologi ini," katanya.

Tidak hanya itu, *new normal* ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, saat pandemi ataupun sesudahnya, semua aktor politik harus siap dengan fungionalisasi komunikasi politik berbasis digital secara lebih terencana dan sistematis. Politisi juga harus secara serius menyiapkan multiplatform komunikasi. (REK)